

INDEKS REFORMASI HUKUM (IRH)

Biro Hukum Kementerian PU





APA ITU IRH?

Definisi

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah sistem penilaian yang mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Hukum di setiap Kementerian/Lembaga (K/L)

Tujuan

- Memetakan & mereviu regulasi (identifikasi, re-regulasi, deregulasi).
- Memperkuat tata kelola regulasi agar ringkas, efektif, dan partisipatif.
- Menjadi indikator kinerja Reformasi Birokrasi pada level meso (spesifik bidang hukum).





DASAR HUKUM

Regulasi

Poin Kunci

Perpres no. 81 Tahun 2010	Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
• Perpres no. 155 tahun 2024	Organisasi Kemenkum
 PermenPAN-RB no. 25 tahun 2020 & PermenPAN-RB no. 51 tahun 2020 	Indikator & penilaian RB K/L
 Permenkumham No. 23 tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada K/L dan Pemerintah Daerah 	Pedoman resmi pelaksanaan IRH
Keputusan Menkum M.HH-04/2023	Pendelegasian tugas Sekretariat IRH



KAITAN IRH & REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

- Dalam kerangka Reformasi Birokrasi (RB), IRH berfungsi sebagai indikator hasil pada dimensi "Penataan Regulasi" di level K/L
- Pencapaian nilai IRH yang baik → berkontribusi langsung pada indikator RB "Birokrasi Lincah, Efektif, Akuntabel, & Digital" yang dipantau KemenPAN-RB
- Nilai IRH setiap K/L diinput ke Portal RB Nasional dan memengaruhi penilaian RB tahunan

TIMELINE PENILAIAN IRH 2025



Feb – Maret

Sosialisasi ke seluruh K/L oleh Tim Sekretariat Nasional IRH

April – Juni

Sosialisasi ke seluruh K/L oleh Tim Sekretariat Nasional IRH

Juli

Verifikasi & Penilaian Mandiri + unggah Berita Acara oleh Tim Asesor

Akhir Juli

Validasi keikutsertaan oleh Sekretariat Nasional

Agustus

Penilaian Nasional → Nilai Awal → Klarifikasi

September

Rapat Pleno Penetapan Nilai akhir IRH

Oktober

Penyerahan Surat Hasil & input ke portal RB

Nov – Des

Evaluasi & penyempurnaan pedoman 2026



EMPAT VARIABEL PENILAIAN IRH (BOBOT & TUJUAN)

Koordinasi Harmonisasi Regulasi

30%

 Memastikan sinergi K/L-Kemenkum dalam harmonisasi UU-PP-Permen

Kualitas Reregulasi/Deregulasi

30%

 Mutu reviu & tindak lanjut Anev peraturan

Kompetensi Legal Drafter (Perancang)

25%

 Ketersediaan & peningkatan kompetensi Perancang PUU

Penataan Database PUU (JDIH)

15%

 Ketersediaan & kinerja JDIH sebagai single source of truth.



BUKTI DUKUNG PER VARIABEL

Variabel	Indikator Ringkas	Contoh Bukti Dukung (yang WAJIB di-unggah)
Koordinasi Harmonisasi	1. Kelengkapan permohonan harmonisasi RUU/RPP/RPerpres2. Kelengkapan harmonisasi Permen/PerLPNK3. Kehadiran Pimpinan pada rapat pleno	 Surat permohonan harmonisasi & Rancangan Izin prakarsa / program legislasi SK Panitia Antar K/L Naskah Akademik / urgensi Surat selesai harmonisasi Undangan + Daftar Hadir + Notula + Dokumentasi rapat
Kompetensi Perancang	1. Data Fungsional Perancang2. Program & anggaran pelatihan3. Keikutsertaan Perancang pada diklat/Workshop	 Matriks data Perancang + bukti akun Surat permohonan akun (jika belum terbit) SK CPNS formasi Perancang RKA pelatihan, surat tugas, sertifikat
Re-regulasi / Deregulasi	1.Kebijakan Anev 2.Proporsi evaluasi tercapai 3.Tindak lanjut rekomendasi 4.Pelibatan Analis Hukum	 SK Anev Peraturan Daftar target vs realisasi + laporan hasil Program legislasi/Naskah Akademik/usulan revisi Rekap Analis Hukum & SK tim Anev
Database PUU (JDIH)	Penilaian kinerja JDIHN (7 aspek, 29 indikator)	e-Report JDIHN Desember t-1 - SK Menteri Hukum & HAM tentang nilai JDIHN



CATATAN TEKNIS

Data dukung tahun penilaian 2024 yang dinilai untuk siklus 2025

Semua dokumen PDF atau JPEG (<5 MB) & diberi nama Var_A1_Surat_Permohonan.pdf dst

Gunakan format SK & matriks yang sudah disediakan dalam Pedoman (Lampiran I & II)



RANGKUMAN

 Nilai IRH ≥ 95 (kategori "Istimewa") menjadi target minimum Kementerian PUPR 2025.

 Kesiapan data dukung adalah kunci sukses — rapat koordinasi internal perlu dilakukan

 Hubungi Sekretariat Nasional IRH (<u>irh@kemenkum.go.id</u>) untuk pendampingan teknis unggah.

#